

**PERBANDINGAN INDEKS TRANSPARANSI
KABUPATEN ATAU KOTA SE-PROVINSI
SUMATERA SELATAN DAN LAMPUNG**

SKRIPSI



**Nama : Nur May Lena
NIM : 222016257**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**PERBANDINGAN INDEKS TRANSPARANSI
KABUPATEN ATAU KOTA SE-PROVINSI
SUMATERA SELATAN DAN LAMPUNG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Nur May Lena
Nim : 222016257**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur May Lena
NIM : 222016257
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Perbandingan Indeks Transparansi Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah dittulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2020



Nur May Lena

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Perbandingan Indeks Transparansi Kabupaten/Kota
Se Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung
Nama : Nur May Lena
NIM : 222016257
Fakultas : Ekonomi
Program studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

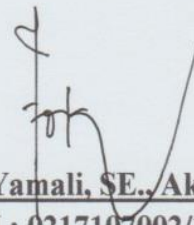
Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, Februari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si.
NIDN/NBM : 0206046303/784021



Dr. Fadhil Yamali, SE., Ak., M.M.
NIDN/NBM : 0217107002/1191648

Mengetahui,
Dekan
u.p. Ketua Program akuntansi



Betri, SE, M.Si., AK., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*“Jika tak mampu menjadi hujan yang memberi kehidupan,
maka cukuplah menjadi setetes air yang bermanfaat”*

(Nur May Lena)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Ibu dan Ayah*
- 2. Adik-adik perempuanku*
- 3. Keluarga besarku*
- 4. Pembimbingku*
- 5. Almamaterku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Alhamdulillah rabbi'alaamiin, tak ada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia_Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Indeks Transparansi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung”, sebagai syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 dengan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan dan tenaga yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin tersusun sebagaimana mestinya.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati saya ucapkan terimakasih kepada Ibunda saya ibu Marpaton A.Ma.Pd dan Ayahanda saya bapak Husin serta keluarga tercinta atas doa dan bantuan yang memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada Bapak Drs. Sunardi. S.E., M.Si dan Bapak Dr. Fadhil Yamali, S.E., Ak., M.M. yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini.

Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Pembimbing Akademik.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terimakasih.

Palembang, Februari 2020

Penulis

Nur May Lena

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. <i>Good Governance</i>	12
a. Pengertian <i>Good Governance</i>	12
b. Karakteristik <i>Good Dovernance</i>	13
c. Sasaran Kepemerintahan dan Prinsip Kepemimpinan	14

2. Transparansi	16
a. Pengertian Transparansi	16
b. Pentingnya Transparansi	16
c. Tujuan Transparansi	17
d. Manfaat Transparansi	18
e. Pengukuran Transparansi	19
f. Rumusan Menghitung Indeks	20
g. Pedoman Pemberian Skor	20
B. Penelitian Sebelumnya	22
C. Hipotesis	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Operasionalisasi Variabel	29
D. Populasi dan Sampel	29
1. Populasi	29
2. Sampel	30
E. Data yang Diperlukan	31
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	34
1. Analisis Data	34
2. Teknik Analisis	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	38
a. Sejarah Singkat dan Tata Letak Geografis.....	38
b. Visi dan Misi.....	39
c. Demografis.....	40
2. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Lampung.....	41
a. Sejarah Singkat dan Tata Letak Geografis.....	41
b. Visi dan Misi.....	42
c. Demografis.....	43
3. Data yang Dibutuhkan.....	44
B. Pembahasan Hasil Penelitian	45
1. Pengelompokan IKK dari EKKPD sesuai dengan Indikator	46
2. Menentukan Skor Masing-masing Indikator.....	58
3. Pembuatan Draf Indeks Transparansi Kabupaten/Kota	59
4. Menentukan Bobot pada Masing-masing Indikator	60
5. Membuat Kertas Kerja Indeks Transparansi.....	61
6. Hasil Pengujian Hipotesis	64

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel I.1	Kertas Kerja Skor Transparansi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.....	8
Tabel I.2	Range Skor Masing-masing Indikator Kinerja Kunci	9
Tabel II.1	Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi	20
Tabel II.2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	26
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	29
Tabel III.2	Daftar Populasi Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.....	30
Tabel III.3	Daftar Sampel Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.....	31
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Selatan.....	41
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Kabupaten atau Kota Provinsi Lampung	43
Tabel IV.3	Kertas Kerja Skor Transparansi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.....	44
Tabel IV.4	Pengelompokan IKK sesuai dengan Indikator Transparansi	46
Tabel IV.5	Hasil Opini Audit BPK RI Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung	47
Tabel IV.6	Ada atau Tidaknya Implementasi E-Procurement.....	49
Tabel IV.7	Temuan BPK RI yang Ditindak Lanjuti	50

Tabel IV.8	Ada atau Tidaknya Perda atau Perbup tentang Konsultasi Publik	52
Tabel IV.9	Ada atau Tidaknya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.....	53
Tabel IV.10	Ada atau Tidaknya Media Informasi	54
Tabel IV.11	Ada atau Tidaknya tentang Standar Pelayanan Publik	55
Tabel IV.12	Rasio Belanja terhadap Anggaran Belanja	56
Tabel IV.13	Rasio Belanja terhadap Total APBD	57
Tabel IV.14	Draft Indeks Transparansi Kabupaten atau Kota	59
Tabel IV.15	Persentase Pembobotan Indikator Kinerja Kunci	60
Tabel IV.16	Kertas Kerja Indeks Transparansi Kabupaten atau Kota	61
Tabel IV.17	Hasil <i>Group Statistics</i> Provinsi Sumatera dan Lampung.....	65
Tabel IV.18	Hasil <i>Independent Sampel T Test</i> Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.....	65
Tabel IV.19	Hasil <i>Group Statistics</i> Kabupaten/Kota	66
Tabel IV.20	Hasil <i>Independent Sampel T Test</i> Kabupaten/Kota	66
Tabel IV.21	Pernyataan Hipotesis.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Uji Statistik Menggunakan SPSS
- Lampiran 2 Tabel t
- Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 5 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 6 Sertifikat TOEFL
- Lampiran 7 Sertifikat BUMDES
- Lampiran 8 Sertifikat PKL
- Lampiran 9 B Plagiat
- Lampiran 10 Abstract
- Lampiran 11 Biodata Penulis

Abstrak

Nur May Lena/222016257/2020. Perbandingan Indeks Transparansi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan indeks transparansi tiap-tiap daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Jenis penelitian ini adalah komparatif dan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 32 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan uji *independent sampel t tes*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak ada perbedaan antara indeks transparansi Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Hasil lain juga menunjukkan tidak ada perbedaan indeks transparansi antara daerah yang berstatus kota dengan daerah yang berstatus kabupaten.

Kata kunci: Indeks Transparansi

Abstract

Nur May Lena / 222016257/2020. A Comparison of The Transparency Index of each District in South Sumatra and Lampung Province.

This study aimed at determining and analyzing the index of transparency of each region in the province of South Sumatra and in the province of Lampung . This study was a kind of comparative and descriptive research. The data used was secondary data such as performance evaluation region of local government processes (EKPPD). The population of this study was 32 District in South Sumatra Province and Lampung Province. Technique used for collecting the data was documents. Data analysis technique used was quantitative and qualitative analys by using independent samples t test. The results showed that there was no difference between the index of transparency in Province of South Sumatra and the index of transparency in Province of Lampung. The other result also showed that there were no differences of transparency index between the areas whose status were a city and the areas whose status were a district.

Keywords: Transparency Index

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi saat ini, pemerintah daerah berkewajiban menerbitkan informasi atas aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan undang-undang tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 07 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Terbitnya beberapa peraturan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan transparan. Transparansi pada pemerintah diharapkan mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), juga memperbaiki kinerja dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomi, efisiensi, dan efektif.

Pemerintah berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan keberadaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diharapkan mampu mendorong terwujudnya *good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi,

keseimbangan antargenerasi (*international equity*), dan evaluasi kinerja. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Menurut Arifin (2015: 107) *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*.

Menurut United Nasional Development Program (UNDP) beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. *Transparency*, dibangun atas kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. *Responsiveness*, Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*. *Consensus orientation*, berorientasi

pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. *Efficiency and effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara bedaya guna (efisien) dan behasil guna (efektif). *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. *Strategic vision*, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money (economy, efficiency, effectiveness)*.

Transparansi merupakan salah satu asas yang penting untuk mencapai tata kelola yang baik, terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara. Pemerintah berupaya untuk menerapkan *good publik governance* terhadap organisasi sektor publik agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Menurut Arifin (2015: 108) makna transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu, salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan Upaya peningkatan menejemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi berperan penting bagi masyarakat dalam mengotrol kegiatan pemerintah. Penyajian informasi yang utuh pada lembaga pemerintah akan menciptakan transparansi sehingga mampu mewujudkan

akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2018: 48-49) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dan masyarakatnya, sehingga terwujud pemerintah daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut Arifin (2015: 108) untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya, salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat memberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan dan Syamsul (2016), berpendapat bahwa indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* di seluruh daerah Indonesia berada di kategori *insufficient* (tidak cukup). Penelitian lain juga dilakukan oleh Muhammad dan Daewanis (2019), berpendapat bahwa terdapat 6 kabupaten/kota di Indonesia berada di kategori *sufficient* (cukup), sedangkan yang lainnya berada di kategori *insufficient* (tidak cukup).

Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan *Internasional Budget Partnership* pada 23 Januari 2013 menunjukkan peningkatan transparansi anggaran pemerintah Indonesia. *Index* transparansi Indonesia meningkat jika dibandingkan OBI tahun 2010. Pada 2012, transparansi anggaran Indonesia mendapat skor 62, sedangkan pada 2010 hanya mendapat skor 51. Salah satu faktor peningkatan keterbukaan anggaran karena pemerintah membuat *citizen budget* atau ringkasan anggaran di media massa dan elektronik serta laman Kementerian Keuangan pada 2012. "Kecukupan informasi dalam dokumen seperti nota keuangan juga mulai bertambah. Nota keuangan cukup lengkap dan memadai seperti adanya informasi tentang target kinerja dan lain-lainnya" tutur sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan. Namun, menurut Yuna, masih ada banyak hal yang masih perlu dilakukan pemerintah dalam meningkatkan transparansi anggaran.

Menurut sekjen FITRA Yuna, merinci ada tiga hal yang harus dicermati pemerintah untuk menaikkan indeks transparansi anggaran tersebut. Pertama, pemerintah harus mempublikasikan *in year report* atau realisasi anggaran pada tahun berjangka setiap tiga bulan. Kedua, menurut Yuna, pemerintah perlu meningkatkan secara komprehensif kecukupan informasi anggaran pada nota Keuangan RAPBN dan dokumen pendukung RKA-KL, termasuk menampilkan pencapaian kinerja dalam LKPP dan melakukan konsultasi publik pada penyusunan *citizen budget*. Terakhir, dibandingkan Filipina, menurut Yuna, tingkat keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran di

Indonesia masih tergolong lemah. Sebab itu, pemerintah harus memperluas partisipasi publik dalam penyusunan anggaran di legislatif. Prestasi peningkatan indeks keterbukaan anggaran Indonesia bukanlah keberhasilan pemerintah semata. Peningkatan ini bisa dicapai karena faktor lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik, partisipasi masyarakat sipil, dan inisiatif global seperti *open government*" kata dia. Sumber: [<http://amp.kompas.com/nasional/read/2013/02/03/12313074/Transparansi.Anggaran.Pemerintah.Meningkat>]

Angka transparansi anggaran pemerintah Indonesia mengalami perbaikan. Mengutip hasil riset *Open Budget Survey* garapan *Internasional Budget Partnersip* (IBP) skor keterbukaan anggaran Indonesia tahun 2017 naik menjadi 64 poin dari 59 poin per tahun 2015. Peneliti (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenti Nur Hidayat menyampaikan walau transparansi laporan kementerian keuangan sudah meningkat tapi masih ada sejumlah catatan yang bisa diperbaiki, di antaranya adalah keterbukaan proses pembuatan anggaran dan masalah tenggat waktu pelaporan. Sumber: [<http://amp.kontan.co.id/news/skor-transparansi-anggaran-pemerintah-meningkat-fitra-masih-ada-catatan>]

Manager Riset FITRA (Forum Indonesia Transparansi Anggaran, Misbahul Hasan, mengatakan Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan indeks transparansi tertinggi dari 70 kabupaten/kota yang diteliti. “Kabupaten Kebumen patut diapresiasi, karena memiliki indeks transparansi tertinggi dari 70 Kabupaten/Kota dan 18 Provinsi yang diteliti” katanya

dalam acara *launching Local Budget Study (LBS)* di *Hotel Aryaduta, Jakarta*, Kamis, 16/03. Misbah memaparkan, FITRA saat ini melihat pemerintahan pusat dan daerah masih memiliki transparansi yang rendah. Ini akan berdampak kepada indeks keterbukaan lainnya. Sementara, keterbukaan anggaran publik menjadi hak bagi setiap warga negara. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyambut baik hasil *lauching* tersebut. “Pemerintah pusat dan daerah saat ini masih memiliki kendala terkait transparansi. Peran-peran LSM, seperti FITRA, diperlukan untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang lebih baik” tambahnya.

Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, juga menegaskan penelitian ini dilakukan atas dasar masalah transparansi yang masih rendah. Padahal, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik cukup lama diterapkan. Berdasarkan hasil *launching* tersebut, Kabupaten Kebumen mendapatkan Indeks transparansi tertinggi. Sedangkan, kabupaten Mempawah tercatat sebagai daerah dengan indeks transparansi terendah. Penelitian ini menggunakan tiga komponen indeks transparansi yaitu uji akses dokumen, keterbukaan proses, dan kelembagaan dan kinerja PPID. Sumber: [\[http://info-anggaran.com/2017/04/21/kabupaten-kebumen-men-dapatkan-penghargaan-dengan-indeks-transparansi-tertinggi\]](http://info-anggaran.com/2017/04/21/kabupaten-kebumen-men-dapatkan-penghargaan-dengan-indeks-transparansi-tertinggi)

Berdasarkan data yang diperoleh dari www.otda.kemendagri.go.id yang berupa hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), maka diperoleh hasil skor transparansi untuk kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung sebagai berikut :

Tabel I.1
Kertas Kerja Skor Transparansi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung

NO	Kabupaten/ Kota	Transparansi									Skor
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
	Sumatera Selatan										
1	Kab Banyuasin	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
2	Kab Empat Lawang	3	4	4	4	4	4	4	2	4	33
3	Kota Lahat	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
4	Kab Muara Enim	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
5	Kab Musi Banyuasin	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
6	Kab Musi Rawas	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
7	Kab Ogan Ilir	3	4	4	4	4	4	1	1	3	28
8	Kab Ogan Komering Ilir	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
9	Kab Ogan Komering Ulu	4	4	3	4	4	4	4	2	3	32
10	Kab Ogan Komering Ulu Selatan	4	4	3	1	4	4	4	2	4	30
11	Kab Ogan Komering Ulu Timur	4	4	3	1	4	4	1	2	2	25
12	Kota Lubuklinggau	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
13	Kab Pagaralam	4	4	4	1	4	4	4	2	4	31
14	Kota Palembang	4	4	3	1	4	4	1	2	4	27
15	Kota Prabumulih	4	4	4	1	4	4	1	2	4	28
	Lampung										
1	Kab Lampung Barat	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
2	Kab Lampung Selatan	4	4	4	1	4	4	1	2	4	28
3	Kab Lampung Tengah	4	4	3	1	4	4	4	2	4	30
4	Kab Lampung Timur	3	4	4	1	4	4	4	3	3	30
5	Kab Lampung Utara	4	4	3	4	4	4	4	3	4	34
6	Kab Mesuji	4	4	3	1	4	4	1	2	4	27
7	Kab Pasawaran	3	4	4	4	4	4	4	2	4	33
8	Kab Pringsewu	4	1	4	4	4	4	4	1	4	30
9	Kab Tanggamus	4	4	4	1	4	4	1	2	4	28
10	Kab Tulang Bawang	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
11	Kab Tulang Bawang Barat	4	1	4	1	4	4	4	1	4	27
12	Kab Way Kanan	4	4	4	4	4	4	1	3	4	32
13	Kota Bandar Lampung	4	4	4	4	4	4	4	1	4	33
14	Kota Metro	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34

Sumber: Penulis, 2020

Keterangan :

- T1 : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
- T2 : Keberadaan Implementasi E-Procurement
- T3 : Temuan BPK RI yang Ditindak Lanjuti
- T4 : Keberadaan Perda/ PerBup tentang Konsultasi Publik
- T5 : Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005
- T6 : Adanya Media Informasi Pemda yang dapat Diakses Publik
- T7 : Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- T8 : Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja
- T9 : Rasio Belanja Publik Terhadap APBD

Tabel I.2
Range Skor Masing-masing Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci					Skor
T2, T4, T5, T6, dan T7	T1	T3	T8	T9	
Tidak	TMP	0-25%	< 80%	25-30%	1
	TW	26-50%	81-90%	31-35%	2
	WDP	51-75%	91-95%	36-40%	3
Ada	WTP	76-100%	96-100%	> 41%	4

Berdasarkan data Tabel I.1 menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan skor transparansi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung yang belum maksimal dalam melakukan transparansi. Fenomena yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung jika dilihat dari tabel diatas, adanya kondisi perolehan skor yang beragam. Dari

Tabel I.1 tersebut terlihat bahwa masih ada daerah yang memperoleh opini WDP, yang menggambarkan daerah tersebut cenderung kurang dalam mengungkapkan informasi keuangan kepada publik. Masih terdapat daerah yang tidak memiliki e-procurement, menunjukkan bahwa daerah tersebut kurangnya keterbukaan proses, perencanaan dan diselesaikannya kegiatan dalam memperoleh barang/jasa. Terdapat daerah yang tindak lanjut terhadap temuan BPK cukup rendah, hal ini menunjukkan semakin rendahnya temuan yang ditindak lanjuti maka semakin rendah pula tingkat keterbukaan daerah tersebut. Beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah tentang konsultasi publik dan standar pelayanan publik. Belum adanya peraturan daerah tersebut menandakan bahwa kurangnya kepatuhan terhadap peraturan dan proses pelayanan, sehingga menimbulkan kurangnya komunikasi dengan

masyarakat dan batasan terkait hak dan kewajiban. Rendahnya realisasi belanja terhadap anggaran dan rasio belanja terhadap APBD di beberapa daerah dapat memungkinkan terjadinya tingginya tingkat kebocoran APBD dan menimbulkan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme pada daerah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan kurangnya penelitian tentang indeks transparansi, maka peneliti ingin mengetahui indeks transparansi pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perbandingan Indeks Transparansi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah perbandingan indeks transparansi tiap-tiap daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung ?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis perbandingan indeks transparansi tiap-tiap daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

D. Manfaat

1. Bagi Penulis

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hal yang berkaitan dengan indeks transparansi pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung

Bagi pemerintah daerah diharapkan memotivasi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung untuk meningkatkan indeks transparansi.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi dan pertimbangan bagi penelitian sebelumnya, khususnya untuk peneliti yang memiliki topik yang relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuna (2013, Maret). Transparansi Anggaran Meningkat. Diakses 11 November 2019, dari <http://amp.kompas.com/nasional/read/2013/02/03-/12313074/Transparansi.Anggaran.Pemerintah.Meningkat>
- Adriana dan Taufiq Ritonga.2018. Analysis of Local Manegemen Transparency Based on Website on Local Government in Java. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 10, No. 1, Hal. 13-26.
- Agus, Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Tahir. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kedua, Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Diakses 8 Januari 2020, dari <https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2018/04/11/391/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung>.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Diakses 8 Januari 2020, dari <https://sumsel.bps.go.id/dynamictable/2018/01/22/306/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-selatan>.
- Boldbaatar, D, NC, Kunc, and E. Werker. 2019. Improved Resource Governance though Transparency. Evidence from Mongolia. *Journal the Extrative Industries and Society*. Vol. 6, Hal. 775-787.
- Dwi Afrianti, Harpanto Guno Sabanu, dan Fahrizal Noor. 2015. Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal BPK RI, Indonesia*. Vol. 1, No 1, Hal. 21-42.
- Fitriya, Fauzi dkk. 2019. *Metodelogi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salamba Empat.
- IBP. 2017. Open Budet Survey 2017. Diakses 22 Desember 2019, dari <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/open-budget-survey-2017-OBIrankings.pdf>
- Irwan Taufiq Ritonga dan Syamsul. 2016. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 20, No. 2, Hal. 110-126.
- Junssen, Marin dan Jeroen van den Hoven. 2015. Big and Open Linked Dara (BOLD)in Goveerment: A Challenge to Transparency and Privacy ?. *Goverement Informatika Quarterly*. Vol. 32, Hal 363-368.

- Kementrian Dalam Negeri. 2017. Diakses 13 Oktober 2020, dari <http://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/05/kepmendari-EKPPD-Thdp-LPPD-2017>.
- Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-XIII.2/9/2012 Pelaporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pelaporan.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offside
- Misbahudin Hasan dan Yenny S (2017, April). Kabupaten Kebumen Mendapatkan Penghargaan dengan Indeks Transparansi Tertinggi. Diakses 11 November 2019, dari <https://info-anggaran.com/2017/04/21/Kabupaten-Kebumen-mendapatkan-indeks-transparansi-tertinggi/>
- Muhammad Rizki Alwahidi dan Darwanis. 2019. Pengukuran Transparansi Keuangan Daerahh Berbasis *Website* pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 4, No. 1, Hal. 153-161.
- Nur dan Bambang. 2018. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Menejemen*. Yogyakarta: Andi Offside.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Konsultasi Publik.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Yenti Nur Hidayah (2018, April). Skor Transparansi Anggaran Meningkat, Fitria : Masih ada Catatan. Diakses 11 November 2019, dari <https://amp.kontan.co.id/news/skor-transparansi-anggaran-pemerintah-meningkat-fitria-masih-ada-catatan>
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- V. Wiratna Sujarweni. 2018. *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Williams, Andrew. 2014. A Index of Information Transparency and Accountability. *Journal of Comperative Economics*. Vol. Xxx, Hal.xxx-xxx